



Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan**Budianto Taib¹, Mastia M Halimu²**¹ Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk, Email:² Manajemen, Universitas Tompotika Luwuk, Email: tiahalimu83@gmail.com**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan populasi yang berjumlah 76 KK dan sampel berjumlah 22 orang. Teknik penarikan sampel menggunakan Teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui Observasi, Wawancara, Kuesioner, Dan Dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah menggunakan rumus statistik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan bahwa Pelaksanaan Program perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah dengan persentasenya (70,37%), dengan rincian untuk Sub Variabel Perencanaan hasilnya dengan presentase (71,36%), dan untuk Sub Variabel Pelaksanaan hasilnya dengan presentase (66,28%), dan Sub Variabel Evaluasi hasilnya dengan presentase (71,42%).

Kata Kunci: Perumahan Swadaya, Kabupaten Banggai Kepulauan**ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine how the implementation of the Self-Help Housing Program at the Department of Housing, Settlement Areas and Land Affairs of Banggai Kepulauan Regency. The type of research used is Descriptive qualitative with a population of 76 families and a sample of 22 people. The sampling technique uses Purposive Sampling Technique. Data collection is obtained from secondary data and primary data obtained through Observation, Interviews, Questionnaires, and Documentation. While the data analysis used is using a simple statistical formula. The results of the study show that the overall implementation of the Self-Help Housing Program at the Department of Housing, Settlement Areas and Land Affairs of Banggai Kepulauan Regency is with a percentage (70.37%), with details for the Planning Sub-Variable the results are with a percentage (71.36%), and for the Implementation Sub-Variable the results are with a percentage (66.28%), and the Evaluation Sub-Variable the results are with a percentage (71.42%).

PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Perumahan tidak dapat dilihat dari sebagai sarana kebutuhan kehidupan sematamata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati diri (VERY Y LONDA, 2021). Setiap orang pasti berupaya memiliki rumah yang layak dihuni untuk tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya, manusia tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat tinggal dalam kehidupan sehari-hari (Apriyanto *et al.*, 2021). Teori Maslow menyebutkan bahwa sesudah manusia terpenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu sandang, pangan, dan kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi.

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga negara mempunyai peran besar dalam pembangunan (Arifin Utha *et al.*, 2021). Dalam hal pembangunan pemerintah mempunyai kewajiban sebagai pihak yang bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana kondusif. Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah, kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung dalam setiap pembangunan untuk tercapai kesejahteraan masyarakat (Collins *et al.*, 2021). Mengingat Setiap pembangunan khususnya pembangunan perumahan dan permukiman masih banyak yang tergolong miskin dan terbelakang, sehingga pembangunan perumahan menjadi tuntutan utama dalam mempercepat pembangunan perumahan yang mandiri (Handayani & Safrida, 2021).

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui dengan menggunakan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan publik yang diinginkan (Aziz, 2021). Implementasi kebijakan akan sangat mudah dimengerti apabila digunakan model tertentu. Suatu model yang digunakan akan memberikan gambaran mengenai suatu objek, keadaan, maupun proses (Indah Khairunisa, 2021). Dengan demikian implementasi suatu program dapat diartikan sebagai penggunaan sarana maupun prasarana yang akan dipilih dalam mencapai tujuan-tujuan. (Sulubara *et al.*, 2021) Pengukuran keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat diprosesnya, yaitu mempertanyakan apakah pelaksanaan suatu program telah sesuai dengan yang sudah ditentukan yaitu dengan melihat pada pelaksanaan dan apakah tujuan dari program tersebut tercapai. Oleh karena itu yang paling penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan publik yaitu tindakan-tindakan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan (Lembo, 2021).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Muhammad Rifai Adi Pratama, 2021). Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengenai perumahan swadaya merupakan suatu kegiatan pelaksanaan dari pemerintah untuk membangun kelompok penduduk yang tidak mempunyai rumah atau kurang mampu dalam pembangunan rumah, dan memiliki pendapatan yang kurang cukup buat kebutuhan sehari-hari sehingga masih banyak masyarakat yang masih kurang untuk mempunyai tempat tinggal. Perumahan merupakan suatu proses bermukim atau tempat tinggal masyarakat dan lingkungan masyarakat dalam melangsungkan kehidupan (Maiqirlana et al., 2021).

Sebagai salah satu Daerah yang turut melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, tentunya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan menekankan program bantuan stimulant untuk rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk Kabupaten Banggai Kepulauan ada 4 kecamatan yang terdaftar dalam jumlah layak huni dan tidak layak huni. Untuk jumlah rumah layak huni di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu diantaranya; Kecamatan Tinangkung masih ada 8 desa yang masih dikategori rumah layak huni yaitu; Manggalai dengan jumlah rumah layak huni 158, Desa Ambelang dengan jumlah rumah layak huni 254, Desa Saiyong dengan jumlah rumah layak huni 145, Desa Tompudau dengan jumlah rumah layak huni 187, Desa Bongganen dengan jumlah rumah layak huni 420, Desa Baka dengan jumlah rumah layak huni 508, Desa Bulungkobit dengan jumlah rumah layak huni 212, Desa Kelurahan Salakan berjumlah 559 rumah layak huni. Kemudian, Kecamatan Totikum untuk rumah layak huni Desa Salangano berjumlah 161, Desa Sambiut 250, Desa Sakay 118, Desa Tone 19, dan Desa Kombutokan berjumlah 564 rumah layak huni. Selanjutnya untuk Kecamatan Liang untuk Desa Liang dengan jumlah rumah layak huni 247, Desa Popidolon 53, Desa Lolong 40, Desa Okumel 98, Desa Tomboniki 55, dan Desa Mamulusan 93. Kemudian, untuk Kecamatan Peling Tengah Desa Patukuki dengan jumlah rumah layak huni 489, Desa Koyobunga 123, dan Desa Alakasing 211.

Untuk rumah tidak layak huni di Kabupaten Banggai Kepulauan masih ada empat kecamatan dengan masing-masing Desa yang belum mendapatkan bantuan Perumahan untuk dijadikan rumah layak huni dan harus menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, rumah tidak layak huni di Kecamatan Tinangkung masih ada Sebelas Desa diantaranya Desa Manggalai dengan jumlah rumah tidak layak huni 45, Desa Ambelang 156, Desa Saiyong 12, Desa Tompudau 157, Desa Bongganen 298, Desa Baka 80, Desa Bulungkobit 74, serta Kelurahan Salakan 45.

Kemudian untuk Kecamatan Totikum, Untuk Desa Salangano rumah yang tidak layak huni berjumlah 98, Desa Sambiut 10. Desa Sakay 27, Desa Tone 90, Serta Desa Kombutokan terdapat 39 rumah tidak layak huni. Selanjutnya untuk Kecamatan Liang Untuk Desa Liang rumah yang tidak layak huni berjumlah 27, Desa Popidolon 129,

Desa Lolong 47, Desa Okumel 243. Desa Tomboniki 31, dan Desa Mamulusan ada 27 rumah tidak layak huni. Kemudian untuk Kecamatan Peling Tengah Untuk Desa Patukuki rumah yang tidak layak huni berjumlah 42, Desa Koyobunga 42, dan yang terakhir Desa Alakasing terdapat 166 rumah tidak layak huni. Total keseluruhan rumah tidak layak huni di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat 1975 Rumah tidak layak huni.

Telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan hasil-hasilnya telah dirasakan bersama. Namun, masih banyak permasalahan yang dikesampingkan dan belum terpecahkan. Berdasarkan hasil observasi awal di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan terkait Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya masih ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya yang kemudian perlu diperhatikan diantaranya Banyak terdapat pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kurangnya komunikasi antar pelaksana dan masyarakat penerima bantuan yaitu sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh, dan tidak membuat masyarakat paham, Kemudian banyak penerima yang layak namun justru namanya tidak ada pada saat bantuan keluar namun yang justru layak yang namanya keluar, kemudian tidak adanya kejelasan jadwal pencairan dana bantuan. Penerima bantuan harus mengetahui kapan pencairan dananya, penerima bantuan tidak diberikan informasi yang jelas mengenai kapan pencairan dapat dilakukan maka jadwal pelaksanaan pembangunan rumah penerima pun menjadi tidak jelas. Sehingga diharapkan kepada Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas-dinas terkait lebih sering melakukan koordinasi, evaluasi lapangan agar meminimalisir setiap permasalahan yang terjadi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan implikasi positif mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan terutama dalam program perumahan swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan jenis data. Sesuai dengan fokus penelitian yaitu evaluasi pelaksanaan program perumahan swadaya. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan, sementara yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah program perumahan swadaya, lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 125 orang yaitu, seluruh pegawai definitif yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 17 orang, Kelompok Kerja Perumahan Pengembangan dan Kawasan Permukiman sebanyak 32 orang, dan masyarakat penerima bantuan yang berjumlah 76 kk.

Teknik pengambilan *Sampling* yang akan digunakan untuk menetapkan anggota sampel, menggunakan teknik *Purposive Sanpling*. *Purposive Sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel dengan tujuan atau pertimbangan tertentu, dan dianggap mengetahui obyek penelitian sampel diambil dari semua anggota populasi dan sampel dengan tetap memperhatikan aspek-aspek obyektivitas (Sugiono, 2021). Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis dalam penelitian ini data secara kualitatif (Waruwu et al., 2021). Hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun hasil dan analisis penelitian dari variabel Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan sub-sub variabel Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi.

1. Sub Variabel Perencanaan

Untuk melihat Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan sub Variabel Perencanaan dalam penelitian ini terdapat 5 indikator yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang kami ajukan melalui kuisioner sebagai tanggapan responden kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang telah di analisis. Untuk keseluruhan tanggapan responden atas jawaban masing-masing indikator sebagaimana kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Total Skor Keseluruhan Sub Variabel Perencanaan

Item Indikator	Tanggapan Respoden								Jumlah
	SS (4)		S (3)		TS (2)		STS (1)		
	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	
Sosialisasi dan Penyuluhan	7	28	15	45	0	0	0	0	
Verifikasi Calon peneriman bantuan (CPB).	0	0	7	21	15	30	0	0	
KesepakatanCalon Penerimaan Bantuan.	0	0	10	30	12	24	0	0	
Indifikasi kebutuhan dan	8	32	10	30	3	6	1	1	

penyusunan proposal berupa uang.									
Penyusunan dan Pengajuan proposal berupa PSU	6	24	13	39	1	2	2	2	
Total Keseluruhan Skor		84		165		62		3	314
Skor Kriteria	Skor Tertinggi × Jumlah Item × Responden (4 × 5 × 22)								440
Nilai Skor	Total Skor: Skor Kriteria × 100 (314 : 440 × 100)								71,36%
Kategori	BAIK								

Sumber: Pengolahan Data Primer November Tahun 2021

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel akumulatif skor diatas tentang Pelaksanaan program Perumahan Swadaya Pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel Perencanaan setelah dijumlahkan persentasenya mencapai 71,36% sehingga dengan mencermati hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk sub variabel Perencanaan adalah berada pada kategori baik.

2. Sub Variabel Pelaksanaan

Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan sub variabel Pelaksanaan dalam penelitian ini terdapat 3 indikator yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang kami ajukan melalui kuisioner sebagai tanggapan responden kemudian disajikan kedalam bentuk tabel yang telah dianalisis. Untuk keseluruhan tanggapan responden atas jawaban masing-masing indikator sebagaimana kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Total Skor Keseluruhan Sub Variabel Pelaksanaan

Item Indikator	Tanggapan Responden								Jumlah
	SS (4)		S (3)		TS (2)		STS (1)		
	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	
Penetapan									

penerima bantuan	5	20	2	6	5	10	10	10	
Pencairan dana bantuan	10	40	11	33	1	2	0	0	
Penyaluran dana bantuan	8	23	2	6	10	20	2	2	
Total Keseluruhan Skor		83		45		32		12	175
Skor Kriteria	Skor Tertinggi × Jumlah Item × Responden (4 × 3 × 22)								264
Nilai Skor	Total Skor: Skor kriteria × 100 (175: 264 × 100)								66,28%
Kategori	BAIK								

Sumber: Pengolahan Data Primer November Tahun 2021

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel skor keseluruhan di atas tentang Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Banggai Kepulauan dengan Sub Variabel Pelaksanaan yang terbagi atas indikator Penetapan Penerima bantuan, Pencairan dana bantuan, dan Penyaluran dana bantuan, setelah dijumlahkan persentasenya mencapai 66,28%. Sehingga dengan mencermati hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten banggai kepulauan dengan Sub Variabel Pelaksanaan adalah Berada pada kategori baik.

3. Sub Variabel Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten banggai Kepulauan dengan sub Variabel Evaluasi dalam penelitian ini terdapat 7 indikator yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang kami ajukan melalui kuisioner sebagai tanggapan responden kemudian disajikan kedalam bentuk tabel yang telah dianalisis. Untuk keseluruhan responden atas jawaban masing-masing indikator sebagaimana kita lihat pada tabel di bawah ini.

Adapun tanggapan responden untuk Sub variabel Evaluasi dengan pernyataan sasaran program berdasarkan hasil penelitian untuk lebih jelasnya sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Skor Keseluruhan Sub Variabel Evaluasi

Item Indikator	Tanggapan Responden				Jumlah
	SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)	

	F	Skor	F	Skor	F	Skor	F	Skor	
Sasaran program	0	0	7	21	13	26	2	2	
Penerima manfaat (penerima bantuan)	6	24	4	12	8	16	4	4	
Prosedur penyelenggaraan BSPS	11	44	10	30	1	2	0	0	
Penggunaan bantuan	12	48	7	21	3	6	0	0	
Keluaran rumah yang telah dibangun	10	40	12	36	0	0	0	0	
Waktu penyelenggaraan BSPS	13	39	9	18	0	0	0	0	
pelaporan	0	0	7	21	15	30	0	0	
Total Keseluruhan Skor		195		159		80		6	440
Skor Kriteria	Skor Tertinggi \times Jumlah Item \times Responden ($4 \times 7 \times 22$)								616
Nilai Skor	Total Skor: Skor Kriteria $\times 100$ ($440 : 616 \times 100$)								71,42%
Kategori	BAIK								

Sumber: Pengolahan Data Primer November Tahun 2021

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada tabel skor keseluruhan di atas tentang Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Sub Variabel Evaluasi yang terbagi atas indikator sasaran program, penerima manfaat (penerima bantuan), prosedur penyelenggaraan BSPS, penggunaan bantuan, keluaran rumah yang telah dibangun, waktu penyelenggaraan BSPS, dan pelaporan, setelah dijumlahkan skor yang didapatkan mencapai 616, setelah dijumlahkan persentasenya mencapai 71,42%. Sehingga dengan mencermati hasil tersebut maka dikatakan bahwa Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Sub Variabel Evaluasi adalah berada pada kategori baik.

Kemudian berdasarkan hasil yang didapatkan dari masing-masing Sub Variabel pada tabel-tabel diatas, untuk mendapatkan hasil secara keseluruhan tentang Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbagi atas Sub Variabel Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Maka dibuat dalam bentuk

akumulatif total keseluruhan Sub Variabel penelitian disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Akumulatif Total Keseluruhan Sub Variabel Penelitian Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

No	Sub Variabel Penelitian	Total Skor	Presentase	SK (1.320)
1	Perencanaan	314	71,36%	
2	Pelaksanaan	175	66,28 %	
3	Evaluasi	440	71,42%	
Total		929	Total Skor: $SK \times 100\%$ $(929 : 1.320) \times 100\%$	70,37%
Kategori		BAIK		

Sumber: Hasil Penelitian diolah November 2021

Berdasarkan hasil di atas, hasil yang didapatkan pada tabel Akumulatif Total Keseluruhan Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Banggai Kepulauan 929, kemudian setelah dijumlahkan presentasinya mencapai 70,37% berada pada kategori baik, yang berarti 22 responden menilai bahwa Dinas Perumahan Perymahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan program perumahan swadaya sudah baik dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan sub variabel penelitian sebagaimana tabel di atas menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun, berdasarkan hasil penelusuran observasi, kuisioner, dan wawancara mendalam ditemukan beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian yang dapat di jelaskan pada pembahasan penelitian ini sebagai berikut.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah, proses menentukan tindakan berdasarkan kondisi yang terjadi demi mencapai tujuan yang berorientasi masa depan. Dalam perencanaan ini meliputi beberapa indikator yaitu Sosialisasi dan penyuluhan, verifikasi calon penerima bantuan (CPB), kesepakatan Calon Penerima bantuan (CPB), identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal berupa uang, penyusunan dan pengajuan proposal berupa prasarana sarana utilitas umum (PSU) dalam perencanaan program perumahan sudah sangat baik namun ada beberapa hal yang perlu di perhatikan di

beberapa indikator yang kemudian menjadi tolak ukur bagaimana pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan

- a. Kesepakatan Calon Penerima Bantuan (CBP), masih belum sesuai dengan proses pelaksanaannya dimana masih perlu diusulkan kembali nama-nama untuk calon penerima bantuan.
- b. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal berupa uang, masih belum sesuai dengan proses pelaksanaannya dimana dokumen proposal tidak diidentifikasi untuk memastikan kelengkapannya hanya sekedar di tuangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal.
- c. Penyusunan dan pengajuan proposal berupa prasarana sarana utilitas umum (PSU), masih perlu diperhatikan lagi dalam pelaksanaannya dimana masih ada KBP yang tidak menyelesaikan PBRS secara berkelompok dimana satu (1) hamparan dan tidak dapat mengajukan proposal pembangunan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dapat dilihat beberapa indikator mengenai pelaksanaan yaitu penetapan penerima bantuan, pencairan dana bantuan, dan penyaluran dana bantuan. Dalam proses pelaksanaan program perumahan sudah sangat baik namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di beberapa indikator yang kemudian menjadi tolak ukur bagaimana pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan.

- a. Penetapan penerima bantuan masih perlu diperhatikan lagi dimana masih belum semuanya dilakukan karena setiap tahun jumlah tidak layak huni itu bertambah.
- b. Penyaluran dana bantuan masih perlu diperhatikan lagi dimana pencairan dana bantuan kadang masih memiliki beberapa kendala dalam prosesnya.

3. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja kedepan. Evaluasi memiliki beberapa indikator yaitu sasaran program, penerima manfaat/penerima bantuan, prosedur penyelenggaraan BSPS, penggunaan bantuan, keluaran rumah yang telah dibangun, waktu penyelenggaraan BSPS, dan pelaporan. Evaluasi program perumahan swadaya sudah sangat baik namun ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan lagi diantaranya.

- a. Sasaran program, masih perlu diperhatikan lagi karena dalam hal ini masalahnya usulan dari Desa, Masyarakat yang kurang mampu yang sebenarnya butuh menerima program bantuan ini tidak menerima bantuan.
- b. Penerima manfaat bantuan perumahan masih perlu diperhatikan lagi dalam prosesnya kadang tidak sesuai dengan juknis yang sebenarnya butuh bantuan itu tidak dapat. lagi-lagi ini desa perlu diperhatikan lagi ketika memberikan usulan.

- c. Prosedur Penyelenggaraan BSPS masih perlu diperhatikan lagi dalam prosesnya kadang tidak sesuai juknis contoh saja itu calon penerima bantuan yang tidak sesuai dengan juknis yang sebenarnya butuh bantuan itu tidak dapat lagi-lagi ini desa perlu diperhatikan lagi ketika memberikan usulan.
- d. Penggunaan bantuan, masih perlu diperhatikan lagi dimana penggunaan bantuan ini bermasalah ketika Kita salah target atau sasaran sejak awal memberikan bantuan kepada Masyarakat yang sebenarnya tidak berswadaya dan akhirnya rumah bantuan tidak diselesaikan sebagaimana yang telah disepakati dan menjadi komitmen sejak awal.
- e. Waktu penyelenggaraan masih perlu diperhatikan lagi dimana waktu penyelenggaraan menjadi molor dari waktu yang telah disepakati karena saat masyarakat yang sebenarnya tidak berswadaya menerima bantuan disitu kemudian rumah bantuan tidak diselesaikan sebagaimana yang telah disepakati dan menjadi komitmen sejak awal.
- f. Pelaporan masih perlu diperhatikan lagi dimana biasanya tidak dilakukan tepat waktu

KESIMPULAN

Sebagaimana rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan Kaawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah baik dengan presentase 70,37%. Artinya, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan telah melaksanakan dengan baik program Perumahan Swadaya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam membantu Masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

Terlepas dari baiknya pelaksanaan program perumahan swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program yaitu kesepakatan Calon Penerima Bantuan (CBP), identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal berupa uang, masih belum sesuai dengan proses pelaksanaanya, Penyusunan dan pengajuan proposal berupa prasarana sarana utilitas umum (PSU) masih perlu diperhatikan lagi dalam pelaksanaanya, Rumah tidak layak huni yang bertambah setiap tahun dan perlu di perhatikan kembali, Pencairan dan bantuan yang masih memiliki kendala dalam prosesnya, serta usulan dari desa atas nama-nama penerima bantuan perumahan swadaya perlu di perhatikan lebih teliti kembali agar sesuai target Masyarakat penerima bantuan yang benar-benar sesuai dengan peraturan.

SARAN

Berdasarkan hasil yang telah di dapatkan tentan Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada DISPERKIMTAN juga Pemerintah Desa agar memperhatikan kembali nama-nama calon penerima bantuan agar sesuai dengan peraturan siapa saja yang berhak menerima bantuan perumahan swadaya.
2. Diharapkan kepada DISPERKIMTAN agar lebih teliti dalam melakukan Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal berupa uang dan penyusunan dan pengajuan proposal berupa prasarana sarana utilitas umum (PSU) Pelaksanaan
3. DISPERKIMTAN perlu mendata kembali dengan teliti setiap tahun karena setiap tahun jumlah tidak layak huni itu bertambah.
4. DISPERKIMTAN diharapkan agar mengawasi bahkan setelah proses pencairan.
5. Bukan hanya untuk DISPERKIMTAN tetapi juga untuk setiap Pemerintah Desa diharapkan agar setiap memberikan usulan nama-nama penerima bantuan perumahan harus sesuai dengan peraturan, Masyarakat yang kurang mampu yang sebenarnya butuh menerima program bantuan ini tidak menerima bantuan dan penggunaan bantuan ini bermasalah ketika Kita salah target atau sasaran sejak awal karena memberikan bantuan kepada Masyarakat yang sebenarnya tidak berswadaya dan akhirnya rumah bantuan tidak diselesaikan sebagaimana yang telah disepakati dan menjadi komitmen sejak awal ini kemudian perlu dijadikan perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Apriyanto Romadhan, Habibah, S., Taqwa Sihidi, I., & Kamil, M. (2021). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tabalong : Sebuah Evaluasi. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 26-44. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.12>
- Arifin Utha, Justawan, & Marlita. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Di Kabupaten Buton Selatan. *Journal Publicuho*, 5(4), 1113-1126. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.51>
- Aziz, M. A. (2021). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Gedangan Oleh Satker Penyediaan Perumahan Jawa IV*. 05(01), 53-64.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (Bsps) Dalam Penyediaan Rumah Bantuan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar*. 167-186.

- Handayani, D., & Safrida, S. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 34-45. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.41440>
- Indah Khairunisa, R. H. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Indah*. 4, 1424-1435.
- Lembo, I. (2021). *Volume 22, No. 88, Tahun 2024 p-ISSN: 0215-9617 Program Bantuan Rumah Swadaya Berbasis POKMASIM-B Di Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. 22(88).
- Maiqfirlana, A., Huda, S., & Utami, A. F. (2021). Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 71-83.
- Muhammad Rifai Adi Pratama. (2021). Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Desa Krobokan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689-1699.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: AlfabetaSatria.
- Sulubara, S. M., Amrizal, A., Efendi, A., Budiman, B., Abidin, Z., & Maulya, R. (2021). *Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sesuai Prinsip Keadilan dan Ketepatan untuk Penerima Program Rumah Layak Huni Analysis Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS)*
- VERY Y LONDA. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tendeana. *Implementasi Program BantuanStimulanPerumahanSwadayadalamPenyedian Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan*, VII(ISSN 2338-9613), 35-45.
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917-932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>